



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

**KURIKULUM  
PENINGKATAN  
PEMAHAMAN  
HAK  
KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA**

<p align="center"><b>Garis-Garis Besar Kurikulum</b>  <b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>  <b>Bagi Wartawan Media Massa se-Indonesia</b></p>				
No.	Materi	Sub Materi	Durasi	Metode
1.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsepsi Kepentingan Nasional dan Kewaspadaan Nasional</li> <li>b. Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, dan Integrasi Nasional serta Paradigma Nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika)</li> <li>c. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis (nasional, regional, global) Terkini terhadap Integrasi Nasional dan Kedaulatan Bangsa</li> <li>d. Penguatan Wawasan Kebangsaan</li> <li>e. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila</li> <li>f. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa</li> <li>g. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Ideologi Nasional</li> <li>h. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Dasar negara.</li> <li>i. Tantangan reaktualisasi implementasi Pancasila di era globalisasi</li> </ul>	9 x 60 Menit	<i>Experiential Learning</i>
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme</li> <li>b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional</li> <li>c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Konstitusi</li> <li>d. Perubahan Konstitusi</li> </ul>	2 x 60 Menit	Ceramah dan Tanya Jawab
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945</li> <li>b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara</li> <li>c. Sistem Pemerintahan</li> <li>d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>)</li> <li>e. Otonomi Daerah</li> <li>f. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi</li> </ul>	2 x 60 Menit	Ceramah dan Tanya Jawab

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

		g. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi		
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep dan prinsip-prinsip HAM</li> <li>b. Perkembangan HAM dan sebagai tata nilai pergaulan masyarakat internasional</li> <li>c. Jaminan dan pengaturan HAM dalam UUD Tahun 1945</li> <li>d. Kewajiban dan tanggung jawab Negara terhadap HAM</li> <li>e. Terminologi dan Klasifikasi pelanggaran HAM</li> </ul>	2 x 60 Menit	Ceramah dan Tanya Jawab
5.	Hukum Acara, Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penyelesaian Perkara PHPU Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>d. Ketentuan Permohonan Pemohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Legal Standing</i> Pemohon</li> <li>2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li> <li>3) Pokok Permohonan</li> <li>4) <i>Petitum</i></li> </ul> </li> <li>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan Pendahuluan</li> <li>2) Pemeriksaan Persidangan</li> <li>3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli</li> <li>4) Putusan Sela</li> </ul> </li> <li>f. Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>g. Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ul>	2 x 60 Menit	Ceramah dan Tanya Jawab

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan Putusan</li> <li>2) Sistematika Putusan</li> <li>h. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>i. Mekanisme Pengajuan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Secara Langsung</li> <li>2) Secara <i>Online</i></li> </ul> </li> <li>j. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>k. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, dan Pihak Terkait</li> <li>l. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>m. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</li> </ul>		
6.	<p>Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara <i>online</i></li> <li>b. Informasi Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</li> <li>c. Persidangan Jarak Jauh (<i>video conference</i>)</li> <li>d. Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan</li> </ul>	2 x 60 Menit	Simulasi

**Garis-Garis Besar Kurikulum**  
**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

No.	Materi	Sub Materi	Durasi	Pengajar	Metode
1.	<b>Wawasan Kebangsaan*</b>	a. Konsepsi Kepentingan Nasional dan Kewaspadaan Nasional b. Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, dan Integrasi Nasional serta Paradigma Nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) c. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis (nasional, regional, global) Terkini terhadap Integrasi Nasional dan Kedaulatan Bangsa d. Penguatan Wawasan Kebangsaan	120 Menit	Guru Besar Bidang Wawasan Kebangsaan/Akademisi/Praktisi	Ceramah dan Tanya Jawab
2.	<b>Reaktualisasi Implementasi Pancasila*</b>	a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila b. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa c. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Ideologi Nasional d. Reaktualisasi implementasi Pancasila sebagai Dasar negara. e. Tantangan reaktualisasi implementasi Pancasila di era globalisasi	120 Menit	Akademisi/Praktisi	Cermah dan Tanya Jawab
3.	<b>Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia</b>	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Konstitusi d. Perubahan Konstitusi	120 Menit	Akademisi/Praktisi	Cermah dan Tanya Jawab
4.	<b>Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD 1945</b>	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara c. Sistem Pemerintahan d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i> )	120 Menit	Akademisi/Praktisi	Ceramah dan Tanya Jawab

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

		e. Otonomi Daerah			
5.	<b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945</b>	a. Konsep dan prinsip-prinsip HAM b. Perkembangan HAM dan sebagai tata nilai pergaulan masyarakat internasional c. Jaminan dan pengaturan HAM dalam UUD Tahun 1945 d. Kewajiban dan tanggung jawab Negara terhadap HAM e. Terminologi dan Klasifikasi pelanggaran HAM	120 Menit	Akademisi/Praktisi	Ceramah dan Tanya Jawab
6.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</b>	a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi c. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar d. Putusan MK terkait Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara	120 Menit	Hakim Konstitusi/ Akademisi/Praktisi	Ceramah dan Tanya Jawab
7.	<b>Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</b>	a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai : 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum ( <i>legal standing</i> ) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan ( <i>Petitum</i> ) Pemohon a. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon	120 Menit	Panitera Pengganti/Peneliti/Pranata Peradilan	Praktik dan Diskusi <b>Keterangan:</b> Jumlah total peserta dibagi menjadi 4 kelas yang berisi 30-40 peserta yang kan didampingi oleh 2 Fasilitator
8.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</b>	a. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon b. Praktik penulisan Identitas Lengkap Pemohon c. Praktik menguraikan mengenai : 1. Apa saja kewenangan Mahkamah 2. Bagaimana kedudukan hukum ( <i>legal standing</i> ) Pemohon 3. Tenggat waktu Permohonan 4. Penulisan Pokok Permohonan Pemohon	420 Menit	Panitera Pengganti/Peneliti/Pranata Peradilan	Praktik dan Diskusi <b>Keterangan:</b> Jumlah total peserta dibagi menjadi 4 kelas yang berisi 30-40 peserta yang kan didampingi oleh 2 Fasilitator

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Penulisan Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon</li> <li>6. Penulisan Permintaan (<i>Petitium</i>) Termohon</li> <li>7. Penulisan Sistematika Penomoran</li> <li>8. Pelabelan alat bukti</li> <li>9. Kesesuaian antara alat bukti dengan daftar alat bukti</li> <li>10. Penggunaan baju toga untuk advokat</li> </ul> <p>d. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon</p>			
9.	<b>Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang berbasis Teknologi Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara pengajuan permohonan pengujian Undang-undang berbasis Teknologi informasi</li> <li>b. Jadwal persidangan</li> <li>c. Tracking Perkara dan tempat duduk siding</li> <li>d. Pelayanan Persidangan jarak jauh</li> <li>e. Website MK dan Click MK</li> </ul>	120 Menit	Pusat TIK	Simulasi dan diskusi
10.	<b>Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presentasi hasil penyusunan permohonan pemohon dari:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Mahkamah</li> <li>2. Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon</li> <li>3. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li> <li>4. Pokok Permohonan Pemohon</li> <li>5. Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon</li> </ul> </li> </ul>	120 Menit	Panitera Pengganti/Peneliti/Pranata Peradilan	<p>Praktik dan Diskusi</p> <p><b>Keterangan:</b> Jumlah total peserta dibagi menjadi 4 kelas yang berisi 30-40 peserta yang kan didampingi oleh 2 Fasilitator</p>

**Catatan : \* materi ini bersifat tentatif**